

REFERENCES

- Aini, N., DP, E. N., & Julita. (2014). Analisis pengaruh unsur-unsur internal control system terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Vol.1 No. 2*, 1-14.
- Apriyani, F. (2015). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten sleman)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Belkaoui, A. R. (2006). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba.
- Cahyani, N. M., & Utama, I. K. (2015). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 825-840.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Donnelly, M., Dalrymple, J. F., & Hollingsworth, I. P. (1994). The Use and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 7 Issue: 3, 4-15.
- Faizal, Y. A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kulon Progo)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haddad, A. E., Sbeiti, W. M., & Qasim, A. (2017). Accounting legislation, corporate governance codes and disclosure in Jordan: a review. *International Journal of Law and Management*, Vol. 59 Issue: 1, 147-176.
- Halachmi, A. (2002). Performance Measurement and Government Productivity. *Work Study*, Vol. 51 Issue: 2, 63-73.
- Hidayatullah. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank*.
- Indriantoro, & Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- Keay, A. (2017). Stewardship Theory: is board accountability necessary. *International Journal of Law and Management*, Vol. 59 Issue: 6, 1292-1314.
- Kusumaningrum, I. (2010). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lembaga Administrasi Negara. (2000). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI*.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 1.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurillah, A. S. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- O'Brien, J. (2006). *Introducing to Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktiandra. (2010). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Pong Leung, T. K., & Adams, J. (2009). Explaining IT usage in government through "resistance to change". *Journal of Chinese Entrepreneurship*, Vol. 1 Issue: 3, 176-192.
- Pratolo, S., Jatmiko, B., & Anwar, M. (2016). *Financial Statement Public Sectors Berbasis Web-ICT : Pola Pemetaan Laporan Keuangan Melalui Web-ICT untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta: Research Center Repository UMY.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* Vol. 2 No. 1, 37-46.
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh ketaatan terhadap peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* Vol. 4 No. 1.

- Republik Indonesia . (n.d.). *Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Rofika, & Ardiantoro. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi ISSN 2337, 197-209.*
- Saukkonen, N., Laine, T., & Suomala, P. (2018). Utilizing management accounting information for decision-making: Limitations stemming from the process structure and the actors involved. *Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 15 Issue: 2, 181-205.*
- Sekretariat Daerah Bantul. (2017, Februari). *Pemerintah Kabupaten Bantul.* Retrieved November 7, 2018, from [bantulkab.go.id: https://setda.bantulkab.go.id/documents/20180326094802-laporan-kinerja-setda-tahun-2017.pdf](https://setda.bantulkab.go.id/documents/20180326094802-laporan-kinerja-setda-tahun-2017.pdf)
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kinerja manajerial sebagai variabel moderating. *Jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi vol. 4 no. 1.*
- Sofyani, H. (2013). Hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 10 (2), 184-205.*
- Soleman, R. (2007). *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).* Bandung: Disertasi Universitas Padjajaran.
- Stanbury, W. (2003). Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality. *Fraser Institute Digital Publications.*

- Susanty, A. I., Yuningsih, Y., & Anggadwita, G. (2018). Knowledge management practices and innovation performance: A study at Indonesian Government apparatus research and training center. *Journal of Science and Technology Policy Management Vol. 9 Issues: 3*, 310-328.
- Wahid, I., Nasir, A., & Supriono. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Agam). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 2457-2471.
- Wardhana, G. A., Rasmini, N. K., & Astika, I. B. (2015). Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 4.09, 571-598.
- Wessels, P. (2004). Information technology and the education of professional accountants. *Meditari Accountancy Research*, Vol. 12 Issue: 1, 219-234.
- Zirman, Darlis, E., & Rozi, M. (2010). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Vol. 18 No. 1*.